

# STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH BERBASIS PEGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAERAH DI KABUPATEN SUMBA TENGAN PROVINSI NTT

Oleh

**Urbanus Ola<sup>1</sup>**

[olahurek@gmail.com](mailto:olahurek@gmail.com)

& **Adrianus Ketmoen<sup>2</sup>**

[ketmoen.adrian@yahoo.com](mailto:ketmoen.adrian@yahoo.com)

**ABASTAK**

Otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat, bukan merupakan hal yang mudah. Kesulitan itu semakin berat ketika pemerintah daerah otonom harus mandiri membiayai urusan rumah tangganya sendiri dengan bertumpuh pada pendapat asli daerah. Potensi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) patut dikelola dengan baik agar berkontribusi bagi penerimaan daerah. Artikel ini menawarkan strategi optimalisasi PAD berbasis potensi unggulan daerah. Potensi unggulan daerah diidentifikasi dan dikembangkan selanjutnya dikelola secara sinergis oleh pemerintah, masyarakat dan investor. Pemda bukan sekedar memungut pajak dan retribusi dari masyarakat sebagai PAD belaka tetapi berkewajiban mengembangkan potensi unggulan daerah yang telah menjadi komoditi rakyat sebagai sumber penerimaan daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sekaligus mempercepat pembangunan daerah serta taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

**Kata Kunci: otonomi daerah, potensi unggulan, pendapatan asli daerah**

## ABSTRACT

*Regional autonomy as the rights, powers and obligations of an autonomous region to regulate and manage local government and community affairs is not an easy thing. The difficulty is getting worse when the autonomous regional government must be independent in financing its own household affairs by relying on the original regional opinion. Regional potential as a source of Regional Original Income should be managed properly so that it contributes to regional revenues. This article offers a strategy for optimizing Regional Original Income based on regional superior potential. Regional superior potentials are identified and further developed to be managed synergistically by the government, community and investors. The regional government does not just collect taxes and fees from the community as a mere Regional Original Income, but is obliged to develop regional superior potential which has become a people's commodity as a source of local revenue.*

**Keywords: regional autonomy, superior potential, regional original income**

---

<sup>1</sup> Dosen pada Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unika Widya Mandira Kupang Nusa Tenggara Timur

<sup>2</sup> Dosen pada Prodi Studi Pembangunan FEB Unika Widya Mandira Kupang Nusa Tenggara Timur

## PENDAHULUAN

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mrngurus rumah tangga sendiri dipahami sebagai sebagai daerah otonom.

Otonomi daerah sesungguhnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Secara etimologi, 'otonomi' berasal dari kata 'oto' (*auto* = sendiri) dan 'nomoi' (nomoi = *nomos* = undang-undang atau aturan) yang berarti mengatur sendiri, wilayah atau bagian negara atau kelompok yang memerintah diri sendiri. Dalam tata pemerintahan, otonomi diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri<sup>3</sup>. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri berarti daerah otonom tersebut, memiliki pemerintahan sendiri, wilayah sediri serta kemampuan membiayai pemerintahan dan pembangunan daerahnya dengan kemampuan keuangan daerah sendiri.

Berdasarkan hasil review Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2019 tentang Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah Otonom disimpulkan bahwa hampir sebagian besar daerah otonom baik provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia belum mandiri fiskal. Provinsi Nusa Tenggara Timur (termasuk didalm Provinsi NTT ini 22 kabupaten dn satu kota) masuk dalam kategori **belum**

---

<sup>3</sup> Bandingkan pandangan para ahli tentang Pemerintahan Daerah: Ateng Safrudin. 1985. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bandung. Bina Cipta. Bagir Manan. *Menyongsosng Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta. PSH FH UII. S.H. Sarundajang, Sarundajang, memetahkan makna otonomi dalam empat hakekat; yakni (a) otonomi merupakan hak bagi sebuah daerah otonom mengurus rumah tangga sendiri, (b) Otonomi merupakan hak mengatur dan mengururs rumah tangga sendiri namun tidak diluar wilayah, (c) Otonomi tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya. (d) Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain; hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga tangga sendiri daerah lain. SH. Sarundajang. 2000. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta. Sinar Harapan.hal 34

**mandiri.**<sup>4</sup> Sebuah daerah otonom seharusnya memiliki kemampuan untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; dan (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin. .

Untuk meningkatkan kemandirian fiskal atau keuangan daerah maka semua potensi ekonomi di daerah dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD semakin tinggi maka semakin mandiri sebuah daerah otonom. Dalam kerangka itu maka setiap daerah otonom mengelola sumber daya yang dimiliki, untuk kemakmuran daerah dan kemakmuran rakyatnya sekaligus menambah paradigma pembangunan yang tadinya terpusat dan vertikal-sektoral menjadi lebih desentralistik- horisontal dan terkoordinasi.

Salah satu faktor utamanya adalah adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu Daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu Daerah adalah pengelolaan potensi daerah yang memiliki keunggulan dan nilai tambah secara ekonomis. Peranan pihak swasta sangat diperlukan untuk kemajuan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah perlu meningkatkan perhatian lebih terhadap kegiatan pengembangan potensi unggulan dalam daerah yang menarik investasi ke daerah.

Strategi dan arah kebijakan makro sedapat mungkin sejalan dan atau mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional serta memahami kebutuhan masyarakat di daerah. Aktivitas pengembangan potensi unggulan dimiliki daerah digalakan secara sistematis guna semakin meningkat dan tetap selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah. Atas dasar penalaran itu pemerintah daerah menggali potensi unggulan daerah dikelola dan

---

<sup>4</sup> Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah TA 2028-2019. Jakarta. BPK RI Hasil reviu kemandirian Fiskal Daerah Otonom dalam empat klasifikasi 1. Sangat Mandiri, 2. Mandiri. 3. Menuju Mandiri dan 4. Belum Mandiri

dikemabnagkan secara sinergis bersama masyarakatnya. Masyarakat perlu diberi peluang dan secara aktif membangun kerjasama untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam mendongkrak penerimaan daerah melalui pengembangan potensi unggulan daerah.

Kabupaten Sumba Tengah merupakan kabupaten hasil pemekaran. Kabupaten Sumba Tengah sebagai kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2007, tepatnya pada 22 Mei 2007. Secara umum Kabupaten Sumba Tengah merupakan salah satu kabupaten dengan potensi pertanian, peternakan dan pariwisata yang luar biasa namun belum dikaji dan dikelola dengan baik.

Sebagai daerah otonom Kabupaten Sumba Tengah masih belum mandiri secara finansial membangun rumah tangga daerah sendiri. Porsi Penerimaan daerah Kabupaten Sumba Tengah dominan bersumber dari pemerintah pusat. Penerimaan daerah bersumber dari Pemerintah Pusat rata-rata 95.064 %. Kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah tidak sampai 10 %. Kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah tiap tahun anggaran rata-rata 4,936 %. Pendapatan Asli Daerah pun cenderung fluktuatif. Tentang fluktuatifnya pendapatan asli daerah Kabupaten Sumba Tengah tersaji pada tabel 1.1.

**Tabel. 1**

**Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Menurut Jenis Penerimaan**

No	Jenis Penerimaan PAD	Penerimaan PAD Kabupaten Sumba Tengah (ribuan rupiah)		
		2018	2019	2020
1	Pajak Daerah	5.001.769	4.123.060	4.902.435
2	Retribusi Daerah	842.566	1.289.095	787.130
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.803.778	4.803.778	4.567.403
4	Lain-lain PAD yang sah	18.109.720	17.089.904	20.233.141
	<b>Jumlah</b>	<b>28.757 833</b>	<b>27.305 837</b>	<b>30.580109</b>

Sumber : LPPD Kabupaten Sumba Tengah, 2018, 2019 dan 2020 yang diolah<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Band.BPS-RI, Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota 2022

Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah otonom semestinya menjadi tanggungjawab pemerintah otonom. Namun kondisi riil yang dihadapi Kabupaten Sumba Tengah jauh dari yang diharapkan. Sebagai sebuah daerah otonom, Sumba Tengah mestinya mampu menaikan PAD sebagai sumber penerimaan daerah. Walaupun tidak seluruhnya namun sedapat mungkin dioptimalkan semua potensi yang dimiliki daerah ini. Untuk mengetahui potensi unggulan daerah maka dibutuhkan analisis dan pembuatan data base potensi wilayah Kabupaten Sumba Tengah. Data base tersebut memuat data-data terkait tentang keadaan geografis, pendidikan, kesehatan, agama, kemiskinan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian dan pariwisata dari Kabupaten Sumba Tengah. Data-data tersebut dijadikan acuan untuk melakukan kajian/analisis dalam menghasilkan kebijakan guna mengoptimalkan PAD dan pendasaran penetapan kebijakan prioritas pembangunan daerah.

Adapun tujuan dari kegiatan penyusunan pengembangan data base potensi unggulan Kabupaten Sumba Tengah yakni (1) Teridentifikasi dan tersusun Data Base Potensi Unggulan di Kabupaten Sumba Tengah dan selanjutnya dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh semua pihak, baik pihak pemerintah daerah Sumba Tengah sendiri maupun instansi lain dan masyarakat luas agar dapat menjadi rujukan perencanaan pembangunan dan rencana investasi. (2) menemukan strategi pengembangan potensi unggulan daerah Kabupaten Sumba Tengah yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan PAD.

## **METODE PENELITIAN DAN ANALISIS**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis basis ekonomi wilayah, digunakan salah satu teknik yang lazim, yaitu analisis kuosien lokasi (*Location Quotient/ LQ*). *Location Quotient* digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor-sektor basis atau unggulan (*leading sectors*). Dalam teknik LQ berbagai peubah (faktor) dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan

wilayah, misalnya kesempatan kerja (tenaga kerja) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah.

Metode *Location Quotient* (Robinson Tarigan, 2005) digunakan untuk mengetahui sektor basis atau potensial suatu daerah tertentu. Metode ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan sektor di daerah (kabupaten/kota) dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas.

Rumus *Location Quotient* ( LQ ) adalah (Robinson Tarigan, 2005) :

$$LQ = v_i / v_t : V_i / V_t$$

Keterangan :

$V_i$  = PDRB sektor pertanian kecamatan se-Kabupaten Sumba Tengah

$V_t$  = Jumlah PDRB sektor pertanian kecamatan se-Kabupaten Sumba Tengah

$V_i$  = PDRB sektor pertanian Kabupaten Sumba Tengah

$V_t$  = Jumlah PDRB sektor pertanian Kabupaten Sumba Tengah.

Dari perhitungan LQ, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jika nilai  $LQ > 1$ , maka sektor/ sub sektor tersebut merupakan sektor basis. Sektor/ sub sektor tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan di dalam daerah saja namun juga kebutuhan di luar daerah karena sektor ini sangat potensial untuk dikembangkan.
2. Jika nilai  $LQ = 1$ , maka sektor/ sub sektor tersebut hanya cukup memenuhi kebutuhan di daerahnya saja.
3. Jika nilai  $LQ < 1$ , maka sektor/ sub sektor tersebut merupakan sektor/ sub sektor non basis dan perlu impor produk dari luar daerah karena sektor ini kurang prospektif untuk dikembangkan.

Selanjutnya digunakan Analisis *Shift-Share*. Untuk menentukan sektor-sektor yang berkembang di suatu wilayah dibandingkan dengan perkembangan ekonomi nasional, digunakan teknik analisis *shift-share*. Teknik ini menggambarkan *performance* (kinerja) sektor-sektor di suatu wilayah dibandingkan dengan kinerja perekonomian nasional. Dengan demikian dapat ditentukan adanya shift (pergeseran) hasil pembangunan perekonomian daerah bila daerah itu memperoleh kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam

perekonomian nasional. Teknik ini membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor pada sebuah wilayah dengan laju pertumbuhan perekonomian nasional serta sektor-sektornya, dan mengamati pula penyimpangan-penyimpangan dari perbandingan-perbandingan tersebut. Bila penyimpangan itu positif, artinya ada keunggulan kompetitif dari suatu sektor dalam wilayah tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Sektor Ekonomi Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011-2015

PDRB Kabupaten Sumba Tengah menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori atau golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

Rincian mengenai distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011-2015 disajikan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 2  
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sumba Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2011-2015

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	43,98	42,63	41,72	41,29	41,12
B	Pertambangan dan Penggalian	3,25	3,42	3,53	3,73	3,97
C	Industri Pengolahan	0,56	0,55	0,53	0,53	0,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	3,08	3,21	3,20	3,21	3,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,50	4,43	4,37	4,13	3,90
H	Transportasi dan Pergudangan	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10
J	Informasi dan Komunikasi	6,89	7,01	6,96	7,08	7,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,28	1,28	1,27	1,32	1,37

L	Real Estat	2,76	2,71	2,76	2,84	2,96
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	24,17	25,14	25,66	25,65	25,20
P	Jasa Pendidikan	8,17	8,30	8,71	8,93	9,43
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,40	0,38	0,36	0,37	0,38
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,31	0,30	0,30	0,29	0,30
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : PDRB Kabupaten Sumba Tengah Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2016

Tabel 3  
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sumba Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2011-2015

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	43,57	42,42	41,41	40,62	39,68
B	Pertambangan dan Penggalian	3,22	3,36	3,49	3,62	3,73
C	Industri Pengolahan	0,56	0,57	0,56	0,56	0,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	3,15	3,23	3,25	3,25	3,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,55	4,61	4,62	4,41	4,18
H	Transportasi dan Pergudangan	0,50	0,51	0,51	0,52	0,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11
J	Informasi dan Komunikasi	6,85	7,17	7,33	7,53	7,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,32	1,33	1,34	1,39	1,42
L	Real Estat	2,76	2,79	2,80	2,85	2,91
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	24,72	25,21	25,74	26,18	26,73
P	Jasa Pendidikan	7,95	7,98	8,13	8,26	8,44



Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,40	0,40	0,39	0,40	0,41
R,S,T, U	Jasa Lainnya	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : PDRB Kabupaten Sumba Tengah Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2016*

Pada tabel-tabel di atas, yang menggambarkan produk domestik regional bruto baik didasarkan pada harga berlaku maupun harga konstan, terlihat bahwa potensi ekonomi di Kabupaten Sumba Tengah didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal yang menarik bahwa dominasi sektor pertanian cenderung menurun setiap tahun, ini menunjukkan terdapat pertumbuhan sektor lain yang dapat dijadikan sumber ekonomi baru yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Tengah.

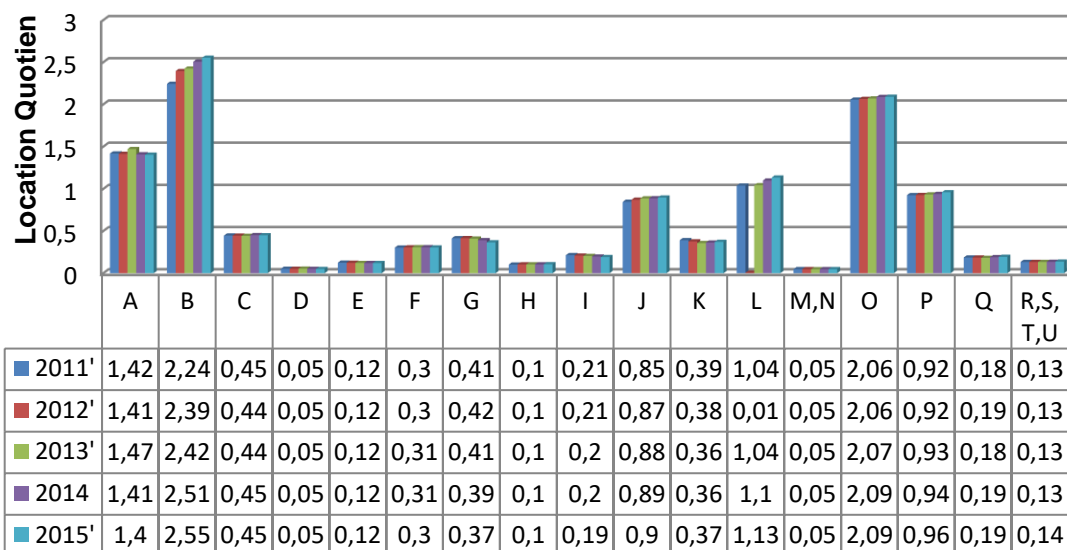
Dominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 43,98% tahun 2011 menjadi sebesar 42,63% pada tahun 2012, kembali menurun ada tahun 2013 menjadi 41,72%, menurun menjadi 41,29% tahun 2014, dan terus menurun hingga 41,12% pada tahun 2015. Seiring menurunnya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diikuti dengan kenaikan sektor ekonomi lain diantaranya sektor pertambangan dan penggalan, sektor informasi dan komunikasi, serta sektor jasa pendidikan.

## **Sektor Unggulan Kabupaten Sumba Tengah**

### **1. Sektor Unggulan Berdasarkan Analisis Location Quotient**

Perubahan nilai LQ sektor-sektor ekonomi Sumba Tengah tahun 2011-2015 disajikan dalam gambar berikut.

**Gambar**  
**Nilai Location Quotient Sektor-Sektor Ekonomi**  
**Sumba Tengah Tahun 2011-2015**



*Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder, 2016*

Berdasarkan Gambar di atas menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang termasuk sektor unggulan dan nilai LQ cenderung naik dari tahun 2011-2015 adalah sektor Penggalian, informasi dan Komunikasi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan. Sektor yang nilai LQ cenderung turun adalah sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dan Perdagangan besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor yang nilai LQ tetap adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Perusahaan dan Jasa Lainnya.

Penurunan nilai LQ dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa keunggulan dari sektor-sektor ini menurun akibat terjadinya peningkatan keunggulan sektor lainnya di Sumba Tengah atau sektor tersebut kalah bersaing dengan pertumbuhan di Kabupaten lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal seperti ini memberikan arahan agar Pemerintah Sumba Tengah secepatnya membenahi sektor tersebut.

## **2. Analisis *Shift-Share* Esteban-Marquillas (E-M) Potensi Relatif Perekonomian Kabupaten Sumba Tengah**

Untuk mengidentifikasi dan menganalisa potensi relatif perekonomian Kabupaten Sumba Tengah digunakan analisis *shift-share* untuk menentukan sektor-sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi. Hasil perhitungan analisis *shift-share* Esteban-Marquillas (E-M), menunjukkan bahwa sektor yang mempunyai spesialisasi adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sektor yang punya keunggulan kompetitif dan spesialisasi adalah sektor Penggalian, *Real Estate*. Sektor yang hanya memiliki keunggulan kompetitif adalah sektor Informasi dan Komunikasi dan sektor Transportasi dan Pergudangan sedangkan sektor lainnya tidak punya keunggulan kompetitif dan spesialisasi.

Berdasarkan hasil analisis *shift-share*, maka sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi perlu didorong. Kebijakan bantuan oleh pemerintah daerah ditujukan pada sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan punya spesialisasi, karena akan tercipta efek pengganda. Hal ini terjadi karena unit usaha basis yang dibantu dan beberapa unit usaha pelayanan akan berkembang, tetapi tidak ada unit usaha yang dirugikan (menurun volume kegiatannya). Sejalan dengan teori basis ekspor maka pendekatan sektoral dapat memacu pertumbuhan beberapa sektor yang potensial atau unggul melalui kemudahan yang disediakan oleh pemerintah termasuk rangsangan untuk percepatan perkembangannya sangat diperlukan. Pendekatan sektoral memberikan kemudahan bagi perkembangan badan usaha, memfasilitasi perkembangan kegiatan ekonomi rakyat yang bersifat mandiri. Disamping itu perlu pengembangan lintas sektor untuk mengaitkan perkembangan antara satu sektor dengan sektor lainnya berdasarkan hubungan fungsional. Pola ini dapat bersifat formal melalui kemitraan usaha dan jaringan kerja maupun informal melalui mekanisme pasar berdasarkan permintaan dan penawaran. Peran pemerintah adalah membantu perkembangan kegiatan lintas sektoral dengan cara memfasilitasi pola kerjasama antar pelaku yang bersifat fungsional melalui

integrasi kebijakan pembangunan. Hasil perhitungan dengan analisis *shift-share* Esteban-Marquillas (E-M), yang menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 4  
Hasil Analisis *Shift Share* Modifikasi Estaban-Marquillas  
Menggunakan Data PDRB Sumba Tengah dan Propinsi Nusa Tenggara Timur  
Tahun 2011-2014 Atas Dasar Harga Konstan 2010

No.	Lapangan Usaha	(E <sub>ij</sub> - E' <sub>ij</sub> )		(r <sub>ij</sub> - r <sub>in</sub> )		Ket .
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	66865.01684	> 0	-0.039339204	< 0	3
B	Penggalian	9287.016704	> 0	0.099128962	> 0	2
C	Industri Pengolahan	-3662.289267	< 0	-0.021222229	< 0	1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-270.482747	< 0	-0.068655752	< 0	1
E	Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-329.1414728	< 0	-0.0775256	< 0	1
F	Konstruksi	-37922.97671	< 0	-0.019651221	< 0	1
G	Perdagangan besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-33550.17818	< 0	-0.102417533	< 0	1
H	Transportasi dan Pergudangan	-23214.67952	< 0	0.002730864	> 0	4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-2332.445523	< 0	-0.122566073	< 0	1
J	Informasi dan Komunikasi	-6527.017065	< 0	0.021774646	> 0	4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-10708.77337	< 0	-0.131690093	< 0	1
L	Real Estate	514.6869104	> 0	0.030864575	> 0	2
M,N	Jasa Perusahaan	-1447.646716	< 0	-0.049041829	< 0	1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	66163.27502	> 0	-0.01781933	< 0	3
P	Jasa Pendidikan	-3394.298743	< 0	-0.018582673	< 0	1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-9159.002345	< 0	-0.013192846	< 0	1
R,S,T ,U	Jasa Lainnya	-10311.26381	< 0	-0.02559499	< 0	1

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder, 2016

Keterangan:

1. *competitive disadvantage, not specialized*
2. *competitive advantage, specialized*
3. *competitive disadvantage, specialized*
4. *competitive advantage, not specialized*

Untuk melihat apakah sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan memiliki spesialisasi tetap bertahan atau mengalami perubahan yaitu dengan membandingkan analisis hasil analisis *Shift Share Modifikasi Estaban-Marquillas* yang menggunakan data PDRB Sumba Tengah dan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2014 Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan data tahun 2011-2015. Berikut disajikan hasil analisis *Shift Share Modifikasi Estaban-Marquillas* yang menggunakan data PDRB Sumba Tengah dan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan 2010.

Hasil perbandingan analisis menggunakan data tahun 2011-2014 dengan tahun 2011-2015 menunjukkan bahwa sektor yang memiliki keunggulan kompetitif bertambah yaitu sektor Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, yang analisis sebelumnya tidak memiliki keunggulan kompetitif. Sedangkan sektor yang lainnya kondisinya sama seperti analisis dengan menggunakan data tahun 2011-2014.

### **3. Langkah Strategis Pengembangan Sektor Unggulan Daerah**

Adapun langkah-langkah strategis pengembangan sektor unggulan daerah Kabupaten Sumba Tengah berdasarkan hasil analisis di atas sebagai berikut :

- 1) Kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah yang memiliki komoditi unggulan pada sub sektor tanaman pangan dapat dijadikan sebagai penyedia bahan baku untuk industri pertanian sehingga dapat memberikan nilai tambah dari produksi pertanian dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sub sektor tanaman pangan yang potensial dikembangkan pada setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah dapat menjadi arah pengembangan produksi komoditas sub sektor tanaman pangan dengan menjadikan kecamatan-kecamatan tersebut menjadi pusat produksi sub sektor tanaman pangan yang potensial agar arah pengembangan sektor pertanian ini lebih terfokus dan terkonsentrasi pada potensi wilayah sehingga pengembangan akan mudah tercapai. Hal serupa dapat juga diterapkan untuk pengembangan sub sektor tanaman perkebunan, peternakan dan perikanan dan kelautan.
- 2) Kecamatan yang dijadikan sebagai arah pengembangan pusat industri sektor pertanian lebih diperhatikan pemerintah daerah dengan cara peningkatan infrastruktur yang sudah ada karena dengan adanya industri pengolahan yang ada, di samping memberi dampak positif dengan penyerapan tenaga kerja, juga akan menambah nilai jual dari hasil sub sektor tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan dan perikanan. Sedangkan kecamatan yang tergolong pada infrastruktur yang

berkembang atau terbelakang harus diperbaiki supaya tidak terjadi ketimpangan infrastruktur antar wilayah.

- 3) Kecamatan yang dijadikan area pengembangan sub sektor tanaman pangan, tanaman perkebunan dan peternakan serta perikanan dapat dijadikan sebagai pusat produksi dari komoditas sub sektor tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan dan perikanan, dan selanjutnya supaya hasil dari produksi tiap sub sektor mempunyai nilai tambah maka perlu dibuat pusat industri untuk mengolah hasil pertanian tersebut sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Selain strategi yang telah dikemukakan, dapat pula ditempu strategi untuk pengembangan sektor pertanian secara umum antara lain:

- 1) Tersedia pasar dan akses pasar untuk hasil-hasil usaha tani  
Pembangunan pertanian akan meningkatkan produksi hasil-hasil usaha tani. Hasil-hasil ini tentunya akan dipasarkan dan dijual dengan harga yang cukup tinggi untuk menutupi biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan para petani sewaktu memproduksinya. Di dalam memasarkan produk hasil-hasil pertanian ini diperlukan adanya permintaan (*demand*) akan hasil-hasil pertanian tersebut, sistem pemasaran dan kepercayaan para petani pada sistem pemasaran tersebut.
- 2) Teknologi yang senantiasa berkembang  
Teknologi pertanian berarti cara-cara bertani. Di dalamnya termasuk cara-cara bagaimana para petani menyebarkan benih, memelihara tanaman dan memungut hasil serta memelihara sumber-sumber tenaga, juga termasuk berbagai kombinasi jenis usaha oleh para petani agar dapat menggunakan tenaga dan tanah mereka sebaik mungkin.
- 3) Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi  
Sebagian besar metode baru yang dapat meningkatkan produksi pertanian memerlukan penggunaan bahan-bahan dan alat-alat produksi yang khusus

oleh para petani. Alat dan bahan produksi tersebut diantaranya bibit, pupuk, obat-obatan pemberantasan hama, makanan dan obat ternak. Pembangunan pertanian memerlukan semua faktor di atas tersedia di berbagai tempat dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi keperluan para petani yang berniat menggunakannya.

4) Adanya perangsang produksi bagi petani

Para petani sebagai orang yang menginginkan kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, wajib berusaha untuk mencapai tujuan-tujuannya tersebut dengan usaha taninya. Faktor utama yang merangsang petani lebih bergairah dalam meningkatkan produksinya adalah perangsang yang bersifat ekonomis. Faktor perangsang tersebut adalah harga hasil produksi pertanian yang menguntungkan, pembagian hasil yang wajar, dan tersedianya barang dan jasa yang ingin dibeli oleh para petani untuk keluarganya.

5) Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu

Produksi pertanian harus tersebar luas. Untuk itu diperlukan suatu jaringan pengangkutan yang menjangkau sebagian besar wilayah untuk membawa bahan-bahan perlengkapan produksi setiap usaha tani, dan membawa hasil usaha tani ke konsumen ke pasar di kota-kota besar dan kecil.

Selanjutnya perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Pendidikan pembangunan

Pendidikan pembangunan dititikberatkan pada pendidikan nonformal yaitu; pelatihan keterampilan, kursus-kursus, penyuluhan-penyuluhan dan sebagainya. Pendidikan pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar dapat diterapkan guna meningkatkan produktivitas petani.

2) Kredit produksi

Untuk meningkatkan produksi, para petani harus lebih banyak mengeluarkan uang untuk membeli benih/bibit unggul, obat-obatan pemberantasan hama, pupuk, dan alat-alat produksi lainnya. Pengeluaran-

pengeluaran seperti itu biasanya dibiayai dari tabungan atau dengan meminjam dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu lembaga-lembaga perkreditan yang memberikan kredit produksi kepada para petani merupakan salah satu faktor penting dalam mempelancar pembangunan pertanian.

3) Kegiatan gotong royong petani

Kegiatan gotong royong petani biasanya dilakukan secara informal. Para petani bekerjasama mulai dari proses menanam sampai memanen hasil panen hasil pertanian. Dengan dasar gotong royong ini selanjutnya dibentuk kelompok-kelompok tani yang menjadi tempat bagi para petani menjalin kerjasama dalam mengembangkan usaha pertaniannya.

4) Perbaikan dan perluasan tanah pertanian

Sebagian besar usaha pembangunan pertanian ditujukan untuk menaikkan hasil panen tiap tahun dari tanah yang telah menjadi usaha tani. Ada dua cara tambahan untuk mempercepat pembangunan pertanian yaitu: Pertama, yaitu memperbaiki mutu tanah yang telah menjadi usaha tani, misalnya dengan pupuk, irigasi, dan pengaturan pola tanam. Kedua, mengusahakan tanah baru, misalnya pembukaan petak-petak sawah baru (ekstensifikasi).



## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Dari berbagai uraian pembahasan analisis penyusunan data base potensi unggulan Kabupaten Sumba Tengah, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Potensi Unggulan ditentukan dengan formula LQ (menentukan sector basis) dan E-M (untuk menentukan sektor spesialis dan kompetitif) :
  - a) Sektor peternakan yang terdiri dari ternak besar; antara lain; sapi, kerbau dan kuda. Ternak kecil potensial di Kabupaten Sumba Tengah, adalah ternak babi dan kambing.
  - b) Sektor perkebunan dan pertanian. Sektor perkebunan yang prospektif adalah kemiri dan jambu mete;
  - c) Sektor pertanian terdiri dari kacang tanah, padi ladang dan jagung.
2. Potensi Unggulan lain ditentukan dengan pendirian bahwa potensi yang dimiliki dapat dikerjakan dan berada di dalam daerah/ di sekitar masyarakat serta mampu dikelola oleh para pihak yang terkait (*stakeholders*) yakni :
  - a) Sektor Pariwisata: Pariwisata yang perlu mendapat prioritas terdiri dari Wisata Alam, sejarah dan religi. Pengembangan ekowisata tetap melestarikan Kuda Sadlewood dan Savana sebagai ikon Pulau Sumba, serta tetap melestarikan megalit kampung adat dan pemakaman.
  - b) Sektor perikanan dan kelautan: Potensi unggulannya adalah “**Garam Mamboro**” yang telah dikembangkan masyarakat dan dikenal luas oleh masyarakat di Pulau Sumba.

### **Rekomendasi**

Adapun beberapa rekomendasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Sumba Tengah yakni :

1. Kebijakan Umum
  - a) Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sumba Tengah mengacu pada sektor unggulan daerah. Perencanaan dan alokasi anggaran memprioritaskan sektor unggulan daerah yang riil dan meminimalisasi alokasi anggaran berdasarkan asas pemerataan.

- b) Meletakkan Dasar kebijakan pengembangan sektor unggulan Kabupaten Sumba Tengah berbasis masyarakat. Masyarakat ditempatkan sebagai mata rantai utama dalam pengembangan potensi unggulan daerah, seperti; pengembangan ternak besar Kuda Sumba (Kuda Sadlewood), mengembangkan dan memberdayakan masyarakat di kawasan Mamboro memproduksi garam konsumsi “Garam Mamboro”.
- c) Intervensi teknologi pengembangan sektor unggulan diselaraskan dengan kemampuan SDM dan kondisi daerah.

## 2. Implementasi

- a) Pengembangan ternak unggulan pada wilayah-wilayah potensial
- b) Budi daya kemiri dan jambu mete, kacang tanah, padi ladang lokal dan jagung secara intensif pada wilayah yang cocok dengan tanam-tanaman tersebut.
- c) Merevitalisasi dan mengembangkan sektor pariwisata, terutama wisata alam, sejarah dan religi serta ekowisata dengan mempertahankan savanna dan Kuda Sadlewood sebagai ikon Pulau Sumba.
- d) Intervensi teknologi tepat guna sesuai kebutuhan dan kemampuan dalam membantu pengembangan potensi unggulan daerah Kabupaten Sumba Tengah.
- e) Data Base Potensi Unggulan Daerah dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk Digitalisasi Data berbasis GIS agar memudahkan para pihak terkait mengakses dan turut terlibat dalam membantu mengelola potensi unggulan ini guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sekaligus mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumba Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Safrudin. 1985. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bandung. Bina Cipta
- Bagir Manan. 2001. *Menyongsosng Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta. PSH  
FH UII
- BPK RI. 20219. *Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah TA 2028-2019*. Badan Pemeriksa Keunagan RI. Jakarta.
- Glasson, John. 1977. *Pengantar Perencanaan Regional*, terjemahan Paul Sitohang, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2011. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. UPP AMP YKPN
- Mudrajad Kuncoro. 2002. *Analisis Spasial dan Regional*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Produk Domestik Regional Bruto Sumba Tengah Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2011-2015, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat.
- Richardson, Harry W. 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*, terjemahan Paul Sitohang, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Baduose Media, Padang-Sumatra Barat.
- S.H. Sarundajang. 2000. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta. Sinar Harapan
- Statistik Pertanian Sumba Tengah. 2015. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat.
- Sumba Tengah Dalam Angka, 2013, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat.
- Sumba Tengah Dalam Angka, 2014, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat.
- Sumba Tengah Dalam Angka, 2015, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat.
- Sumba Tengah Dalam Angka, 2015, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat.
- ,1993, *Analisis Shift-Share: Perkembangan dan Penerapannya*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*.

